

PONDOK PESANTREN MODERN: POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DAN TANTANGAN IDENTITAS MUSLIM

Manshuruddin

Dosen Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

ABSTRACT *Pesantren is the oldest Islamic education institution in Indonesia. At first, the pesantren was known as a traditional educational institution that was taught in surau, prayer rooms, mosques, or the foyer of a teacher using the bandongan and sorogan methods. The books studied in Jurisprudence are generally written in Arabic without lines (harakat) usually called bare books (without harakat) or yellow books (because the paper is yellowish in color). Later, along with the times and advances in science and technology (science and technology), as well as the enactment of the National Education System Law, education in pesantren has been more formulated, in essence there has been an update or modernization of the pesantren education system including: a) developing curriculum in accordance times, b) complementing the means of supporting the learning process, c) developing the santes lifeskill, d) providing a vehicle for self-actualization in the community. Facing the era of globalization which has an impact on various changes both in the economic and socio-cultural fields, the Islamic boarding school is required to respond adaptively and even innovatively with a balanced knowledge of both diniyah and madiyah. So in facing the challenges of the times, pesantren must also always hold the principles of renewal while upholding the values of Islamic teachings, having guided freedom, being able to self-regulate, having a high sense of togetherness, respecting parents and teachers, love of science , independent and simple as an effort to maintain the existence and Islamic identity of its adherents.*

Keywords: *pondok, pesantren, modern, pendidikan, identitas, muslim.*

A. Pendahuluan

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional yang lahir dan tumbuh berbarengan dengan datangnya Islam ke tanah Jawa. Dengan demikian, pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua dan asli (indegenous) di masyarakat Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua, pesantren ditengarai oleh beberapa ahli, sebagai kelanjutan dari sistem pendidikan pada masa Hindu-Budha pra Islam. Terdapat beberapa kesamaan antara pesantren dengan sistem pendidikan sebelumnya seperti: letaknya yang biasanya terdapat di pedesaan, didirikan dan dipimpin oleh tokoh agama, pola dan materi pembelajarannya yang mengarah kepada asketisme, kesederhanaan dan kemandirian.

Dalam sejarah perjalanannya, pesantren telah berhasil melakukan upaya-upaya kontekstualisasi ajaran Islam dengan budaya lokal. Kalangan pesantren pada masa awal Islam, telah dapat menampilkan sekaligus mengajarkan Islam yang dapat bersentuhan mesra dengan nilai-nilai, keyakinan, dan ritual pra Islam. Malahan dalam beberapa kasus, keyakinan-keyakinan dan ritus-ritus tersebut, dipertahankan dan dipraktikkan dengan diberi muatan dan corak Islamioleh sebagian masyarakat Muslim hingga saat ini.

Tulisan ini mencoba memotret hubungan harmonis antara Islam dan modernisasi pada satu sisi, sedangkan pada sisi lain tulisan ini mengaitkan fokus modernisasi dalam konteks pendidikan Islam di pesantren sebagai model pondok pesantren modern. Dengan harapan tulisan ini mampu memberikan pemahaman tentang pola dan formula modernisasi pendidikan Islam, terutama dalam konteks pendidikan di pesantren yang tak lepas keterkaitannya dengan politik pendidikan Islam serta arah dan warna keislaman kaum muslim sebagai sebuah identitas.

B. Pembahasan

1. Modernisasi Pendidikan Islam

Berdasar pemahaman terhadap makna modernisasi atau tajdid, sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu kemudian kita mencoba mengaitkan dengan proses modernisasi atau pembaruan pendidikan Islam. Sesungguhnya ada hubungan timbal balik antara pembaruan Islam dan modernisasi pendidikan Islam. Pendidikan Islam pada dasarnya dapat dijadikan alat yang sangat strategis dalam melaksanakan gerakan modernisasi Islam. Kemudian sebaliknya modernisasi Islam akan berimbas kepada modernisasi pendidikan Islam. Di samping itu, pembaruan pendidikan Islam akan banyak mempengaruhi modernisasi dalam sektor lain.

Pembaruan Islam dalam segala bentuk dan coraknya berakibat pada dilaksanakannya pembaruan di bidang pendidikan Islam. Pendidikan inilah yang dianggap penting untuk dijadikan tempat menyemai pembaruan tersebut. Oleh karena itu, maka tidak ada alasan lain untuk tidak melakukan pembaruan pendidikan dengan cita-cita kependidikan yang merupakan paradigma ideologis tentang bagaimana seharusnya pembaruan pendidikan Islam itu dilakukan.¹

Pembaruan pendidikan Islam pada aspek cita-cita telah dimulai oleh kerajaan Turki Usmani. Pebaruan pendidikan ini disebabkan karena kekalahan umat Islam dalam berbagai perang melawan Eropa. Kekalahan demi kekalahan telah membuat Sultan

¹ Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2006), h. 66-67

Ahmad III (1703-1713 M) menjadi amat prihatin. Dia pun melakukan introspeksi diri dengan meneliti dan menyelidiki keunggulan-keunggulan yang dimiliki Barat. Oleh karena itu, Sultan Ahmad III mengambil tindakan dengan mengirim para duta ke Eropa. Ternyata dilaporkan bahwa di Eropa telah terjadi perubahan luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ini, kemudian Sultan Ahmad III dengan segera mengadakan pembaruan di Turki Usmani.²

Di samping pembaruan yang dilakukan di bidang politik, tetapi tetap melakukan pembaruan dalam bidang pendidikan. Untuk memperkuat militer di Turki Usmani, diperlukan pembaruan lembaga pendidikan sebagai dasar pendidikan militer yang diperlukan. Dengan ini, maka kemudian didirikan Sekolah Teknik Militer di Turki Usmani, mendirikan lembaga terjemah di tahun 1717 M, dan percetakan buku di Istanbul di tahun 1727 M.³

Sultan Mahmud II juga mencoba mendirikan model-model sekolah Barat, misalnya Sekolah Kedokteran atau *Tilhané-I Amire* dan Sekolah Teknik atau *Muhendisane* di tahun 1827 serta Sekolah Akademi Militer pada tahun 1834.⁴ Sultan Mahmud II berprinsip bahwa upaya pembaruan tidak akan pernah terwujud jika fondasi dasar yang menjadi tujuan pembaruan, yaitu pola berpikir masyarakat belum berubah. Perubahan pola berpikir dilakukan dengan memperbaharui kondisi pendidikan Islam sendiri.⁵

Pembaruan juga dilakukan di Mesir. Kehadiran Napoleon Bonaparte pada tahun 1798 M telah membuka mata umat Islam khususnya Mesir, bahwa Islam sedang berada dalam kelemahan dan keterbelakangan. Berdasarkan kenyataan itu, Muhammad Ali Pasya mulai memikirkan dan melakukan pembaruan dalam bidang pendidikan Islam. Kebijakan dan gebrakan yang diambil Muhammad Ali Pasya lebih banyak mengadopsi tata cara dan model yang dilakukan Barat. Kecenderungan ini bisa dilihat dari model sistem pendidikan yang diterapkan di Mesir, guru-gurunya bahkan tenaga ahli untuk memajukan pendidikan pun lebih banyak diimpor dari negeri Barat.⁶ Dia mendirikan kementerian pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan serta mengirim siswa-siswa untuk belajar ke Italia, Perancis, Inggris dan Austria.

Muhammad Abduh juga ikut mencoba melakukan upaya pembaruan pendidikan di Universitas al-Azhar Kairo. Menurut pandangan Abduh, diperlukan

² Suwito, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 169

³ *Ibid*, h. 170

⁴ Hanun Asrahah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 125

⁵ Suwito, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, Op.cit, h. 171

⁶ Hanun Asrahah, *Sejarah Pendidikan Islam*, Op.cit, h. 133

pengintegrasian pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Dengan cita-cita ini, Muhammad Abduh menganggap perlu diajarkannya ilmu pengetahuan modern di lembaga pendidikan Islam di Universitas al-Azhar Kairo, di samping juga perlu memperkuat ilmu-ilmu agama.⁷

2. Pola Pembaruan Pendidikan Islam

Pola pembaruan pendidikan Islam di dunia Islam dapat dipetakan menjadi tiga pola yang berbeda, yaitu:

1. Pola Pembaruan yang Berorientasi ke Barat

Pola ini didasarkan atas pandangan bahwa sumber kekuatan dan kesejahteraan hidup yang dialami oleh Barat adalah sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) modern yang mereka peroleh. Kemajuan di Barat tidak lain adalah merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang pernah berkembang di dunia Islam. Pengembalian kejayaan Islam di masa lalu dapat diperoleh kembali dengan cara memperbaharui pendidikan sebagaimana yang dipraktikkan di Barat.

2. Pola Pembaruan yang Berorientasi pada Sumber Islam Murni

Pola ini didasarkan pada pandangan bahwa Islam sendiri merupakan sumber dari kemajuan dan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan modern. Islam sendiri sesungguhnya mengandung ajaran-ajaran yang membawa kemajuan dan kesejahteraan serta kekuatan bagi manusia. Argumen yang dijadikan dasar adalah telah membuktikannya pada masa kejayaannya di masa lampau.

3. Pola Pembaruan yang Berorientasi Pada Nasionalisme

Rasa nasionalisme timbul bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya pola kehidupan modern yang konon dimulai dari Barat. Bangsa-bangsa Barat mengalami kemajuan dan rasa nasionalisme yang menimbulkan kekuatan-kekuatan politik yang berdiri sendiri. Dalam pendidikan, umat Islam yang telah membentuk pemerintahan nasional tersebut mengembangkan sistem dan pola pendidikan nasionalnya sendiri.

3. Pondok Pesantren Modern

Pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pusat penyebaran agama Islam lahir dan berkembang semenjak masa-masa permulaan Islam masuk di Indonesia. Menurut

⁷ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 67

Kafrawi, di pulau jawa lembaga ini berdiri untuk pertama kalinya di zaman Walisongo.⁸ Untuk sementara, Sheikh Malik Ibrahim atau yang disebut Sheikh Maghribi dianggap sebagai ulama yang pertama kali mendirikan pesantren di Jawa.

Istilah pondok pesantren terdiri dari dua kata yaitu pondok dan pesantren. Menurut Zamakhsari Dhofier Istilah pondok berasal dari pengertian asrama para santri atau tempat tinggal yang terbuat dari bambu atau berasal dari kata arab *funduq* yang berarti hotel atau asrama.⁹ Sedangkan kata pesantren berasal dari kata “santri” yang diawali kata pe- dan diakhiri kata -an, yang berarti tempat tinggal santri.¹⁰ Adapun santri itu sendiri yang Sansekertanya adalah *shantri* memiliki arti ilmuwan Hindu yang pandai menulis.¹¹ Menurut Kafrawi, hal itulah yang kemudian dimiliki oleh Sheikh Maghribi sebagai seorang ulama yang dilahirkan di Gujarat India, yang sebelumnya telah mengenal perguruan Hindu-Budha dengan sistem biara dan asrama sebagai proses belajar mengajar para biksu dan pendeta. Sistem pesantren menyerupai itu, hanya terjadi perubahan dari pengajaran agama Hindu dan Budha kemudian menjadi pengajaran agama Islam.¹²

Pendapat lain mengatakan, kata santri berasal dari kata Cantrik (bahasa Sansekerta, atau mungkin jawa) yang berarti orang yang selalu mengikuti guru, yang kemudian dikembangkan oleh Perguruan Taman Siswa dalam sistem asrama yang disebut Pawiyatan.¹³ Secara terminologi pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.¹⁴ Imam Zarkasyi, secara definitif mengartikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kyai sebagai figur sentralnya, mesjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwalkannya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya.¹⁵

⁸ Kafrawi, *Pembaharuan Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: Cemara Indah, 1978), h. 17.

⁹ Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 18

¹⁰ *Ibid*, h. 18

¹¹ Kafrawi, *Pembaharuan Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: Cemara Indah, 1978), hal. 17

¹² *Ibid*, h. 17

¹³ Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1977), h. 20

¹⁴ Mastuhu, *Dinamika Model Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS.1994) h. 55

¹⁵ Amir Hamzah Wirosukarto, et.al., *KH. Imam Zarkasyi dari Gontor Merintis Pesantren Modern*, (Ponorogo: Gontor Press, 1996), h. 5

Sebagai lembaga pendidikan tertua dan asli (indigenous) masyarakat Indonesia, pesantren menampilkan suatu sistem pendidikan tradisional, yang mempertahankan sistem, materi, metode, evaluasi tradisional dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Sistem pendidikan dengan tidak mengenal penjenjangan, menggunakan metode sorogan dan wetonan, materi pembelajaran dengan menggunakan kitab-kitab ilmu keislaman klasik, telah berlangsung ratusan tahun sejak muncul dan berkembangnya pesantren di Indonesia. Namun demikian, sejalan dengan perkembangan dan perubahan zaman, sebagian besar pesantren mengadakan berbagai perbaikan dan pembenahan sebagai upaya modernisasi pendidikan yang diselenggarakannya.

Terdapat dua alasan pokok yang melatarbelakangi pentingnya dilakukan modernisasi pendidikan Islam, yaitu, pertama, konsep dan praktik pendidikan Islam selama ini terlalu sempit, terlalu menekankan pada kepentingan akhirat, yang melahirkan dikotomi keilmuan yang telah diwariskan ummat Islam sejak masa kemunduran Islam (abad kedua belas). Dikotomi keilmuan dalam pendidikan Islam meliputi: 1) dikotomi antara ilmu agama dan ilmu non agama, yang melanggengkan supremasi ilmu-ilmu agama yang berjalan secara menoton, 2) dikotomi antara wahyu dan alam yang menyebabkan kemiskinan penelitian empiris dalam pendidikan Islam, dan ketiga, 3) dikotomi antara iman dan akal.¹⁶

Mukti Ali yang merupakan seorang tradisionalis berupaya menggelorakan semangat modernis di kalangan pesantren dan dunia pendidikan Islam di tanah air. Menurut Menteri Agama era Orde Baru ini, sistem pendidikan dan pengajaran agama Islam di Indonesia yang paling baik adalah sistem pendidikan yang mengikuti sistem pesantren, karena di dalamnya totalitas kehidupan terselimuti suasana keagamaan. Di sisi lain, Ali pada awal menjabat sebagai Menteri Agama RI menyadari akan lemahnya metodologi pendidikan Islam. Dia menggugat tiga kelemahan mendasar pendidikan Islam dan dengan segera perlu dilakukannya pembaruan. *Pertama*, kelemahan menguasai bahasa asing selain bahasa Arab, terutama bahasa Inggris. *Kedua*, kelemahan dalam metode penelitian ilmu agama Islam atau metode pemahaman Islam. *Ketiga*, kelemahan dalam minat ilmu.¹⁷

Dalam analisisnya, Haidar Putra Daulay menyebutkan tiga aspek dalam modernisasi, inovasi, dan pembaruan pesantren, yaitu: *pertama*, metode, yaitu dari

¹⁶ Armai Arief, *Reformulasi Pendidikan Islam*, (Jakarta, CRSD Press, 2005), h. 176

¹⁷ Norouzzaman Shiddiqi, "Metode Ilmu Agama Islam atau Metode Pemahaman Agama Islam Menurut Prof. Dr. H.A. Mukti Ali", dalam *Agama dan Masyarakat: 70 Tahun H.A. Mukti Ali*, ed. Abdurrahman et.al, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993), h. 599

metode sorogan dan wetonan ke metode klasikal; *kedua*, isi materi, yaitu sudah mulai mengadaptasi materi-materi baru selain tetap memertahankan kajian kitab kuning; dan *ketiga*, manajemen, yaitu dari kepemimpinan tunggal kiyai menuju demokratisasi kepemimpinan kolektif.¹⁸

4. Politik Pendidikan Islam

Pembahasan tentang politik pendidikan termasuk pendidikan Islam dalam makalah ini berangkat dari penelusuran periodisasi kesejarahan perjalanan bangsa. Hal ini dikarenakan politik pendidikan dipandang sebagai kepentingan lokal dan penciptaan identitas kebudayaan negara yang mengalami beberapa fase, yaitu:

1. Pra-kemerdekaan (kolonialisme/penjajahan). Pada era ini, diungkapkan oleh Tilaar, fungsi lembaga pendidikan adalah gerakan perlawanan terhadap kolonialisme.¹⁹ Kala itu, kelompok pemuda terdidik di lembaga pendidikan, berkumpul dan menyusun strategi untuk membebaskan diri dari kungkungan penjajahan. Dalam konteks pendidikan Islam pun sama, Pondok Pesantren sebagai sistem pendidikan Islam tertua di Indonesia, berkontribusi untuk menyahuti semangat perlawanan terhadap penjajah.²⁰
2. Fase kemerdekaan atau sering disebut Orde Lama. Pada masa kemerdekaan, posisi pendidikan ada dipersimpangan walaupun Indonesia sudah merdeka, dimasa ini pemerintah belum menentukan sistem pemerintahan yang akan dianut, sistem negara Islam dan demokrasi menjadi isu hangat serta menjadi perdebatan yang berakhir pada kompromi yang dilakukan. Indonesia menyebut dirinya sebagai negara Pancasila yang mengakomodasi kepentingan kelompok nasionalis, dan religius. Dalam kontek dunia pendidikan pun sama, pendidikan Agama atau keagamaan diakomodasi melalui Kementerian Agama, dan adapun sistem pendidikan nasional dikelola oleh Kementerian Pendidikan.
3. Masa pembangunan atau Orde Baru. Di masa ini, politik pendidikan masih menganut sistem akomodatif terhadap dua model pendidikan yang dicetuskan oleh pemerintah Orde Lama. Namun, kedigdayaan peranan pemerintah, kala itu, cenderung lebih mengutamakan pendidikan umum. Artinya, pendidikan agama di masa orde baru, tidak banyak mendapat perhatian pemerintah. Eksistensi pendidikan Islam lebih mandiri dibandingkan sekolah yang disokong penuh pemerintah. Hal ini disebabkan

¹⁸ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 58-59

¹⁹ HAR Tilaar, *Pendidikan dan Kebudayaan*, (Bandung: Rinneka Cipta, 2001), h. 34

²⁰ Abdurrahman Mas'ud, *Politics of The Nation and Madrasah's Policy*, Paper The Second International Symposium Empowering Madrasah In The Global Context; Jakarta 3-5 September 2013

mayoritas lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah-lebih banyak dikelola oleh swasta atau swadaya masyarakat. Di sisi lain hal yang disayangkan juga, para politisi muslim yang duduk di parlemen juga tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan lembaga pendidikan Islam.²¹ M. Sirozi mengatakan bahwa peranan para politisi muslim diampatasi oleh kekuatan kelompok nasionalis di Orde Baru. Politisi muslim di parlemen hanya mengisi kelompok minoritas.²²

4. Fase pergolakan politik nasional yang lebih menekankan pada aspek demokrasi liberal. Sebuah model demokrasi yang mengedepankan pada kebebasan tanpa batasan. Semua orang bisa berekspresi, berpendapat, bertindak, dan bersekutu. Pada era ini, pemerintah kehilangan taringnya dalam mengakomodasi kepentingan-kepentingan tertentu. Pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator dan mediator terhadap kebutuhan masyarakat, lahirnya Undang-Undang Sisdiknas ini mewajibkan pemerintah untuk mengatur dan mengelola lembaga pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Dari sisi analisa teoritik, keberadaan pendidikan agama dan keagamaan, yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Sisdiknas sebenarnya sudah ada sebelum adanya PP. Nomor 55. Pondok Pesantren, misalnya, adalah dialektika kesejarahan kebudayaan Indonesia atau nusantara dengan Islam. Pesantren sudah ada dan berkembang sebelum Indonesia menjadi negara. Keberadaan peraturan ini memberikan dua dampak kecurigaan motif politik dalam konteks pendidikan Islam khususnya Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah. **Pertama**, pondok pesantren tidak akan lagi memiliki kebebasan dalam upaya mengatur dan mengelola kurikulum yang akan diberikan kepada peserta didiknya. **Kedua**, adanya peraturan ini, secara implementatif akan dijadikan alat politik kepala daerah dalam upaya meraup suara di daerah.

Menurut Haidar, perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia hingga saat sekarang ini telah melalui tiga perodesasi.

1. Periode awal sejak kedatangan Islam ke Indonesia sampai masuknya ide-ide pembaruan pemikiran Islam awal abad kedua puluh. Periode ini ditandai dengan pendidikan Islam yang terkonsentrasi di pesantren, dayah, surau atau masjid dengan titik fokus adalah ilmu-ilmu agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik.

²¹ HAR Tilaar, *Pendidikan dan Kebudayaan*, *Op.cit*, h.. 4

²² M. Sirozi, *Peran Politik Islam di Masa Orde Baru; Studi Terhadap Perumusan Sistem Pendidikan Nasional 1989* (Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2010), h. 34

2. Periode masuknya ide-ide pembaruan pemikiran Islam pada awal abad kedua puluh. Periode ini ditandai dengan lahirnya madrasah, dan juga telah memasukkan mata pelajaran umum ke dalam program kurikulum, serta telah mengadopsi sistem pendidikan modern, seperti metode, manajerial, dan klasikal.
3. Periode terintegrasinya pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional sejak lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Sejak pemberlakuan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Haidar, pendidikan Islam yang dimaknai sebagai mata pelajaran dan lembaga telah mendapat kedudukan dalam sistem pendidikan nasional. Bab-bab dan pasal-pasal serta ayat-ayat yang tercantum dalam PP 28, 29 Tahun 1990, serta PP 72, 73 Tahun 1991, PP 38, 39 Tahun 1992 dan PP 60 Tahun 1999, dan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Pasal 12, 17, 18, 20, 26, 27, 28, dan Pasal 30 telah menggambarkan betapa pendidikan Islam telah duduk dalam sistem pendidikan nasional yang dengan demikian kedudukannya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional.²³

5. Problematika Identitas Muslim

Era globalisasi dewasa ini dan di masa datang memberikan pengaruh perkembangan sosial budaya masyarakat Muslim Indonesia umumnya, atau pendidikan Islam, termasuk pesantren, khususnya. Argumen panjang lebar tak perlu dikemukakan lagi, bahwa masyarakat Muslim tidak bisa menghindarkan diri dari proses globalisasi tersebut, apalagi jika ingin survive dan berjaya di tengah perkembangan dunia yang kian kompetitif.

Mastuhu dalam "Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam" menyikapi globalisasi sebagai sebuah keniscayaan sejarah. Mastuhu meminjam argumen Karl Mannheim yang melihat globalisasi sebagai sebuah ideologi, yaitu proyeksi kehidupan masa depan atau gejala yang akan terjadi di kemudian hari berdasarkan sistem yang dominan di dalam masyarakat.²⁴

Oleh karena itu, komunitas agama perlu mempelajari ilmu pengetahuan yang ada relevansinya dengan kebutuhan masyarakat sehingga menghadap perubahan terutama perubahan yang ditimbulkan oleh globalisasi. Globalisasi dapat mempengaruhi kawasan dan cakrawala pikiran para santri pondok pesantren. Untuk menghindari pengaruh

²³ Salim, *Lektur Modern Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, MIQOT Vol. XL No. 1 Januari-Juni 2016, h. 75-76

²⁴ Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta: Penerbit Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 274

negatif globalisasi, pesantren seharusnya menanamkan nilai-nilai agama dan akhlak pada mereka dengan pertimbangan syariat.

Globalisasi bagi Mujib Shaleh dalam Muhtarom bukanlah sebuah masalah jika globalisasi mendukung dunia pendidikan Islam. Globalisasi yang ditandai dengan adanya alat-alat canggih seperti televisi, komputer, internet, telpon seluler, dan sebagainya justru mengukuhkan usaha memperdalam Islam, meningkatkan intensitas keimanan dan memotivasi lembaga pendidikan Islam untuk membekali santri tidak saja dengan ilmu syariah melainkan juga dengan ilmu-ilmu lain seperti matematika, fisika, dan IPA.²⁵

Pendidikan pesantren tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh global. Pendidikan pesantren merupakan pendidikan yang penggunaannya masyarakat global. Oleh karena itu, pendidikannya harus menyesuaikan diri. Kitab kuning sebagai khazanah kalsik di samping banyak memuat ilmu agama tetapi juga dapat digali ilmu umum seperti kedokteran, falsafah, ekonomi, astronomi yang menjadi karya kebanggaan umat Islam seperti yang dilakukan oleh Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, dan lainnya di masa lalu, ini juga perlu dikaji orang pesantren.

Adapun kelemahan utama pesantren ialah minimnya pengelolaan atau manajemen pesantren. Sebagaimana pendapat Said Agil Siraj dalam Abu Yasid menyebutkan tiga hal yang belum dikuatkan dalam pesantren, yaitu *pertama, tamaddun*; memajukan pesantren. Banyak pesantren yang dikelola secara seerhana. Manajemen dan adminstrasinya masih bersifat kekeluargaan dan semuanya ditangani oleh kyai. Berkaitan dengan hal ini, pesantren perlu berbenah diri. *Kedua tsaqafa*; memberikan pencerahan kepada umat Islam agar kreatif produktif dengan tidak melupakan orisinalitas ajaran Islam. Salah satu contoh, para santri masih setia dengan tradisi kepesantrenan. Namun, mereka juga harus akrab dengan teknologi dan berbagai ilmu pengetahuan serta sains lainnya. *Ketiga hadharah*; membangun budaya. Terkait hal ini, budaya kita dapat warnai oleh jiea dan tradisi Tradisi Islam. Di sini, pesantren diharapkan mampu mengembangkan dan memngaruhi tradisi yang bersemangat Islam di tengah hembusan dan pengaruh dahsyat globalisasi yang berupaya menyeragamkan budaya melalui produk-produk teknologi.²⁶

Menghadapi era globalisasi yang berdampak kepada berbagai perubahan baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya, diperlukan pengkajian bagaimana Pondok Pesantren mengapresiasi gejala modernisasi yang berlangsung demikian kuatnya

²⁵ Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 97

²⁶ Abu Yasid, *Paradigma Baru Pesantren Menuju Pendidikan Islam Transformatif*, (Yogyakarta: IRCiSod, 2018), h. 276

seperti sekarang ini. dengan berbekal ilmu yang berimbang baik *diniyah* maupun *madiyah*-nya. karena itu semua kelompok masyarakat termasuk masyarakat Pondok Pesantren harus siap menghadapinya dan perlu menanggapi problematika identitas muslim secara terbuka dan kritis.

C. Kesimpulan

Sebagai lembaga pendidikan tertua dan asli Indonesia, pesantren menampilkan suatu sistem pendidikan tradisional. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, sebagian besar pesantren mengadakan berbagai perbaikan dan pembenahan sebagai upaya modernisasi pendidikan yang diselenggarakannya, karena pembenahan diri yang hanya berkonsentrasi di wilayah keagamaan tidak lagi memadai. Maka dari itu pesantren harus proaktif dalam memberikan ruang bagi pembaruan sistem pendidikan pesantren, dengan senantiasa apresiatif sekaligus selektif saat menyikapi dan merespons perkembangan dan pragmatisme budaya.

Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan-pembaruan yang harus dilakukan pesantren dalam menghadapi tantangan zaman modern. Adapun pembaruan-pembaruan tersebut bisa dilakukan dengan pembaruan metode pembelajaran, pembaruan kurikulum, pemberuan evaluasi, dan pembaruan organisasi/manajemen.

Tantangan tunggal pesantren pada masa modern adalah adanya gesekan-gesekan globalisasi atau bisa disebut dengan tantangan modernisasi yang bersifat kompleks. Dalam menghadapi tantangan zaman, pesantren juga harus senantiasa memegang prinsip-prinsip pembaruan dengan tetap memiliki kebijaksanaan menurut ajaran Islam, memiliki kebebasan yang terpimpin, berkemampuan mengatur diri sendiri, memiliki rasa kebersamaan yang tinggi, menghormati orang tua dan guru, cinta kepada ilmu, mandiri dan sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Mas'ud, 2013, *Politics of The Nation and Madrasah's Policy*, Paper The Second International Symposium Empowering Madrasah In The Global Context; Jakarta.

Abu Yasid, 2018, *Paradigma Baru Pesantren Menuju Pendidikan Islam Transformatif*, (Yogyakarta: IRCiSod)

Amir Hamzah Wirosukarto, 1996, *KH. Imam Zarkasyi dari Gontor Merintis Pesantren Modern*, (Ponorogo: Gontor Press).

Armai Arief, 2005, *Reformulasi Pendidikan Islam*, (Jakarta, CRSD Press)

- Haidar Putra Daulay, 2007, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media)
- Hanun Asrahah, 1999, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos).
- HAR Tilaar, 2001, *Pendidikan dan Kebudayaan*, (Bandung: Rinneka Cipta)
- Harun Nasution dan Azyumardi Azra, 1978, *Perkembangan Modern Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- _____, 1982, *Pembaharuan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang).
- _____, *Sekitar Masalah Modernisme atau Pembaruan dalam Islam*, dalam *Studia Islamika*, No. 5 tahun 1997, (Jakarta: IAIN Syahid).
- Kafrawi, 1978, *Pembaharuan Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: Cemara Indah)
- M. Sirozi, 2010, *Peran Politik Islam di Masa Orde Baru; Studi Terhadap Perumusan Sistem Pendidikan Nasional 1989* (Jakarta; Rajagrafindo Persada).
- Mashduqi, 2011, *Khilafah Islamiyah: Dari Wahdah Ad-Daulah Menuju Wahdah Al-Ummah*, (Al-Manahij V: Jurnal Kajian Hukum Islam).
- Mastuhu, 1994, *Dinamika Model Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS).
- Mastuhu, 1999, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Penerbit Logos Wacana Ilmu.
- Muhtarom, 2005, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Norouzzaman Shiddiqi, 1993, “Metode Ilmu Agama Islam atau Metode Pemahaman Agama Islam Menurut Prof. Dr. H.A. Mukti Ali”, dalam *Agama dan Masyarakat: 70 Tahun H.A. Mukti Ali*, ed. Abdurrahman et.al, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press)
- Nurcholish Madjid, 1977, *Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina).
- Salim, 2016, *Lektur Modern Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, MIQOT Vol. XL No. 1 Januari-Juni.
- Sunan Abu Dawud, *Kitab Mulahim*, IV.
- Suwito, 2005, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam* (Jakarta : Prenada Media)
- Toto Suharto, 2006, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruz)

Zainul Bahri, 1993, *Kamus Umum: Khususnya Bidang Hukum dan Politik* (Bandung: Angkasa).

Zamaksyari Dhofier, 1985, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai*, (Jakarta: LP3ES).